MENDIDIK PEMIMPIN UNTUK GEREJA TRANSFORMATIF

A.M. SUTRISNAATMAKA, MSF

Pengantar

Kebanyakan lulusan pendidikan imam di Indonesia mengalami beberapa kesulitan ketika memulai tugasnya di suatu paroki atau tempat kerja lain. Dengan bekal yang diperoleh di tempat pendidikan, mereka terbentur pada situasi tempat kerja yang kurang sesuai dengan apa yang digambarkan sebelumnya. Misalnya: pandangan jemaat dan pastor yang ditemuinya ternyata masih diwarnai oleh teologi pra-Vatikan II dan bermental feodalisme: cara kerja pastor kepala masih sangat otoriter, berpola komando, *single-fighter,* dan kurang melibatkan umat. Masih sulit dibayangkan adanya pola pastoral Gereja yang sungguh partisipatif dan transformatif. Sejauh mana hal ini benar, dan dapat digeneralisasi untuk seluruh Gereja Indonesia, masih perlu penelitian yang menyeluruh. Apa yang dapat dilakukan di dalam lembaga pendidikan imam untuk mengembangkan Gereja agar umat bisa lebih partisipatif, ikut serta dalam kehidupan menggereja, masih diperlukan refleksi yang mendalam. Seperti diakui oleh *Kongregasi untuk Pendidikan Katolik bagi Seminari-Seminari dan Lembaga Pendidikan,* kesulitan intern yang ada dalam tempat pendidikan, utamanya terletak pada kurangnya tenaga pembina dan dosen-dosen yang kompeten.[1] Inilah sebagian persoalan yang kiranya relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Masalah yang Muncul dari Lembaga Pendidikan Calon Imam

Dalam kunjungan penelitian ke STFT-STFT di Indonesia beberapa waktu yang lalu,[2] kami mendapat kesan (sementara) bahwa *di satu pihak,* masing-masing STFT memiliki kekhasan dalam memberi tekanan untuk pendidikan para calon imam mereka. Hal ini mudah dimengerti mengingat latar belakang (historis) pendirian STFT berbeda-beda, dan

situasi sosial (kultural, religius, etnis, dan lain-lain), tempat STFT berada juga tidak sama. *Di lain pihak*, juga dapat dilihat bahwa unsur pokok dalam pendidikan calon imam ditandai dengan matakuliah dominan yang sama yaitu: filsafat dan teologi. Di samping ada sejumlah ketetapan dan peraturan yang dituntut oleh Roma,[3] ada pula penyeragaman yang dituntut oleh pemerintah Indonesia dalam Kurikulum Nasional. Selain itu, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) beberapa kali membicarakan soal pendidikan calon imam di Indonesia dengan maksud yang lebih pastoral, yaitu agar imam-imam yang dihasilkan dapat melaksanakan pembaruan seperti yang digariskan oleh Konsili Vatikan II.[4]

Dari hasil pembicaraan pada tingkat para penanggung jawab pendidikan calon imam: para uskup, rektor dan dosen STFT, dan dari praktek di lapangan, kiranya semakin terlihat adanya perubahan ke arah pembinaan dan pendidikan calon yang lebih pastoral. Namun, soalnya adalah: arah pastoral macam apa yang dituju agar Gereja Indonesia menjadi jemaat yang semakin partisipatif dan transformatif? Pendidikan para calon imam yang mempersiapkan mereka menjadi petugas pastoral kiranya memiliki peranan yang sangat strategis dalam memberikan sumbangan untuk membentuk dan mengarahkan Gereja Indonesia di masa depan dalam menghadapi perkembangan zaman.

Kaitannya dengan Masalah-Masalah Kemasyarakatan

Ada pelbagai perubahan dalam dunia sepanjang sejarahnya: perubahan sosial-kultural, sosial-ekonomi, sosial-politik, dan lain-lain, yang terutama dipacu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejauh mana pendidikan calon imam memberikan respon terhadap perubahan dan perkembangan ini? Sebagai salah satu contoh, dapat dikemukakan: disinyalir bahwa mentalitas feodal pastor yang didukung oleh sikap umat menjadi kendala dalam mewujudkan Gereja yang transformatif dan partisipatif, khususnya dalam kaitan dengan demokratisasi dalam Gereja.[5] Bagaimana hal itu dapat diantisipasi dalam masa pendidikan calon imam? Kultur feodal yang tercermin dalam masyarakat pada umumnya dirasa tidak berpadanan secara tepat dengan sikap melayani yang menjadi sikap dasar (pejabat) Gereja. "Pejabat biasanya dilayani, bukan melayani. Pejabat yang melayani merupakan 'barang langka'."[6] Dapatkah pendidikan calon imam mengantisipasi menumbuhkan sikap yang tidak hanya mengikuti arus yang ada dalam masyarakat, tetapi menampilkan pelayanan jemaat gerejawi di masa depan yang sungguh dapat memberdayakan (pejabat) dalam masyarakat untuk

berubah dan ikut serta dalam mewujudkan komunitas persaudaraan yang terbuka bagi semua kelompok?

Dalam tulisan ini, pertama-tama akan disajikan penelusuran historis secara singkat tentang pendidikan calon imam dalam wacana Gereja semesta. Selanjutnya, dipaparkan beberapa pemikiran tentang partisipasi pelbagai pihak yang mencoba merefleksikan perwujudan Gereja yang partisipatif dan transformatif. Bagian terakhir tulisan ini ingin menyampaikan beberapa masalah dan pemikiran lebih lanjut untuk pendidikan imam yang mempersiapkan petugas pastoral untuk Gereja yang partisipatif dan transformatif.

Tinjauan Singkat (Historis) tentang Transformasi di Dalam Pendidikan Imam

Sistem pendidikan imam mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Perubahan zaman menuntut agar Gereja yang senantiasa diperbaharui mempersiapkan petugas-petugas pastoralnya tanggap terhadap perubahan tersebut. Selain itu, masing-masing lembaga pendidikan imam yang tersebar dalam Gereja semesta dari zaman ke zaman mengalami penyesuaian dan perubahan dalam menanggapi situasi gerejawi yang diwarnai oleh perbedaan etnis-kultural dan sosio-religius masyarakat sekitarnya.

Tekanan pada Segi Spiritual, Moral, dan Intelektual sejak Konsili Trente

Sepanjang sejarah Gereja, pendidikan calon imam mendapat tempat dan perhatian khusus, utamanya sejak Konsili Trente (1542 – 1565). Kita mengetahui bahwa sejak awalnya pendidikan calon imam itu menekankan segi spiritual, moral, dan intelektual. Terlebih pada Konsili di Trente[7], pendidikan calon imam yang secara resmi diberi istilah "seminari" (meskipun istilah itu sudah ada jauh sebelumnya), dibicarakan secara serius. Keprihatinan Konsili terhadap pendidikan imam sedemikian besar, sehingga Konsili mewajibkan setiap keuskupan memiliki tempat pendidikan calon imamnya. Gedung seminari itu diharapkan dibangun di dekat katedral, sehingga para seminari bisa bersama-sama melaksanakan ibadat harian yang dipimpin oleh uskup sendiri. Juga diharapkan bahwa sekurang-kurangnya mereka bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan menurut kemampuan dan jenjang yang dimiliki. Bilamana satu keuskupan terlalu kecil dan kekurangan pelbagai halnya (calon, tenaga pembimbing, pengajar, dana, dan lain-lain) untuk mendirikan tempat pendidikan calon imamnya sendiri, maka keuskupan

tersebut bisa menggabungkan diri dengan keuskupan lain yang sewilayah.

Untuk dapat diterima di tempat pendidikan calon imam (seminari), siswa sekurang-kurangnnya berumur 12 tahun dan memiliki keinginan yang tulus untuk melayani Gereja. Calon yang datang dari kalangan kaum miskin dapat dibebaskan untuk tidak membayar uang asrama dan biaya pendidikan, sedangkan anak orang kaya harus membayarnya. Di seminari, mereka dididik baca-tulis, humaniora, liturgi, Kitab Suci, ajaran resmi Gereja (dogma), moral, dan pastoral. Untuk pembinaan spiritual, mereka diwajibkan hadir dalam kurban ekaristi, meskipun mereka hanya diperbolehkan menyambut komuni pada hari-hari tertentu, seperti yang dinasihatkan oleh pembimbing rohani. Kemajuan dalam bidang moral juga dipantau dengan cermat. Bila terjadi pelanggaran, maka yang bersangkutan diberi hukuman sejauh calon imam itu masih bisa diperbaiki; kalau pelanggaran terlalu berat, yang bersangkutan dikeluarkan. Imam pendamping ditunjuk oleh uskup sendiri, demikian pula pelajaran-pelajaran yang harus diberikan dengan mempertimbangkan keperluan umat dan lingkungan khusus keuskupannya.

Penerapan dari hasil Konsili Trente dimulai oleh Paus Pius IV yang segera mendirikan seminari untuk keuskupan Roma pada tahun 1565. Selanjutnya, Karolus Boromeus, Uskup Agung Milano, membuka seminari Santo Yohanes Pembaptis dengan kapasitas 150 mahasiswa. Ia menetapkan syarat yang cukup ketat, antara lain harus mampu secara intelektual. Ia juga mendirikan "La Canonica" untuk 60 mahasiswa yang disiapkan untuk pemeliharaan jiwa-jiwa dengan belajar Kitab Suci, dasar-dasar iman seperti diajarkan dalam Katekismus Trente, dan belajar kasus-kasus. Di beberapa bagian keuskupannya, ia juga mendirikan tiga seminari persiapan: untuk para mahasiswa, untuk yang sudah dewasa, dan untuk anak-anak. Setelah selesai di seminari persiapan ini, mereka bisa meneruskan ke Seminari Tinggi atau ke "La Canonica". Pada awalnya, ia melengkapi stafnya dengan anggota Serikat Yesus, tetapi sesudahnya ia mendirikan Kongregasi Oblat Santo Ambrosius untuk menangani pendidikan di seminari.

Pendirian seminari-seminari itu juga dilaksanakan di Prancis, seperti dilakukan oleh Kardinal Lorraine, Uskup Agung Reims. Tokoh-tokoh seperti John J. Olier, Santo Vincentius a Paolo, dan Santo Johanes Eudes juga sangat berjasa dan mempunyai pengaruh yang besar dalam pendidikan calon imam di Prancis. Semula, Vincentius a Paolo hanya memberikan serangkaian ceramah rohani selama 10 hari untuk calon imam yang akan ditahbiskan; kemudian, rangkaian ceramah diperkem-

bangkan menjadi kursus selama 2–3 tahun sesudah selesai filsafat. Pada tahun 1635, Vincentius mendirikan seminari di Kolese Bons-Enfants untuk mereka yang studi teologi. Selanjutnya, ia mendirikan sekolah Santo Lazare untuk calon-calon muda yang belajar humaniora. Pada tahun 1642, Vincentius memulai seminari menengah dengan nama Santo Karolus Boromeus. Pendidikan calon imam yang mirip dengan model ini kemudian berkembang di seluruh daratan Eropa, Inggris, Irlandia, dan akhirnya juga ke Amerika.

Tekanan Khusus pada Daerah Misi: Adaptasi dengan Situasi Setempat

Di tanah-tanah misi, otomatis model ini dipakai juga dengan beberapa penyesuaian. Paus Benedictus XV, melalui surat apostolik "*Maximum Illud*" (1919), menganjurkan pendirian seminari-seminari setempat di daerah misi agar suatu ketika imam-imam setempat dapat menggembalakan umat dari bangsanya sendiri. Melalui ensiklik "*Rerum Ecclesiae*" (1926), Paus Pius XI menekankan perlunya pendidikan calon imam yang lengkap dan tidak dipersingkat agar imam-imam nantinya sungguh memadai untuk berkarya dalam Gereja. Beliau juga mengatur dan mengorganisir bantuan finansial untuk pendidikan calon imam di misi melalui Karya Misi Kepausan Santo Petrus, di bawah Kongregasi Propaganda Fide. Selanjutnya, Paus Pius XII minta bantuan kepada keuskupan-keuskupan yang lebih tua untuk melengkapi staf di seminari dan menyampaikan beberapa peraturan untuk semua seminari (*lih.* ensiklik "*Fide Donum*", 1947). Ketetapan lebih lanjut diberikan oleh Paus Yohanes XXIII yang antara lain menegaskan bahwa *seminari hendaknya didirikan di tempat-tempat yang tidak terasing (terisolasi), tetapi di tempat yang memiliki hubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari*: bahwa para seminaris secara bertahap dan hati-hati diperkenalkan dengan pengetahuan tentang pandangan umum masyarakat; dan mereka diperbolehkan untuk berpikir bagi keadaan mereka sendiri serta menikmati kebebasan tertentu untuk bertindak. Beliau juga berharap agar selekas mungkin pengaturan seminari untuk imam-imam di daerah misi ini dapat dipercayakan kepada staf setempat. Akhirnya, beliau menekankan pentingnya pelatihan dalam misi dan adaptasi untuk Gereja setempat (*lih.* ensiklik "*Princeps Pastorum*", 1959).[9]

Dari penelusuran sekilas sampai menjelang Konsili Vatikan II ini, menjadi jelas bahwa pendidikan calon imam mengalami macam-macam perubahan penekanan dan penyesuaian dengan situasi zaman yang terus berubah dan berkembang. Oleh karena itu, tidak mengherankan

bahwa setelah Konsili Vatikan II, pendidikan calon imam masih terus berkembang selaras dengan perkembangan pemahaman tentang Gereja itu sendiri.

Tekanan Pastoral pada Konsili Vatikan II

Pada Konsili Vatikan II, kita mendapatkan usaha pembaruan itu melalui Dekrit tentang Pembinaan Imam (*Optatam Totius*). Dekrit itu membicarakan:

1. Penyusunan metode pembinaan imam di setiap negara;
2. Pengembangan panggilan imam secara lebih intensif;
3. Tata-laksana di seminari-seminari tinggi;
4. Pembinaan rohani yang lebih intensif;
5. Peninjauan kembali studi gerejawi;
6. Pembinaan pastoral;
7. Pembinaan seusai masa studi.

Karena situasi di setiap wilayah dan negara berbeda-beda, maka dekrit ini memang hanya memberikan ketetapan umum. Kepada konferensi waligereja setempat, diberikan wewenang untuk membuat peraturan yang lebih khusus untuk pendidikan calon imam diosesan, sesuai dengan Konstitusi Apostolik *Sedes Sapientiae*. Sementara itu, pendidikan imam religius diatur dalam wewenang para pemimpin tarekat.

Dekrit mengenai pendidikan imam mengajak menggiatkan pengembangan panggilan calon imam melalui keluarga, dan kemudian mengadakan pembinaan di seminari dengan sebaik-baiknya. Para calon imam disiapkan untuk mengikuti Kristus dengan semangat rela berkorban, dan dengan hati yang jernih. Di seminari tinggi, seluruh pembinaan diarahkan pada tujuan pastoral, sesuai dengan seluruh warna pembaruan, melalui para pembimbing yang dipilih secara saksama. "Pastoral" dalam kaitan ini dimaksudkan sebagai "penggembalaan umat" melalui pelayanan sabda, ibadat, dan sakramen-sakramen dan pastoral di *kehadiran Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani*. Karena itu, pembinaan rohani dan pembinaan pastoral mendapat penekanan yang besar.

Untuk mencapai itu semua, seluruh studi gerejawi (filsafat dan teologi) perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan umat di daerah tertentu. Dalam kaitan dengan peningkatan studi teologi, misalnya, para mahasiswa diharapkan untuk semakin mengenal Gereja-Gereja dan jemaat-jemaat gerejawi yang terpisah dari Gereja Roma, agar nantinya mereka mampu menyumbangkan jasa demi dialog ekume-

nis. Mereka juga diajak untuk mengenal dan memahami agama-agama lain agar dapat lebih mengenali kebaikan serta kebenaran yang ada dalam agama-agama tersebut (*bdk.* OT 16). Dalam pembinaan pastoral, antara lain yang ditekankan adalah pengembangan kecakapan-kecakapan yang diperlukan untuk berdialog dengan sesama, misalnya kemampuan untuk mendengarkan orang lain dan untuk membuka hati dalam semangat cinta kasih bagi bermacam-macam segi kebutuhan manusia (*bdk.* OT 19).

Gambaran tentang Gereja Partisipatif dan Transformatif Sesudah Vatikan II

Partisipasi pada Pelbagai Bidang dari Pelbagai Pihak

Vatikan II mengajak seluruh umat untuk berpartisipasi aktif dalam hidup Gereja, awalnya dalam berliturgi, khususnya dalam perayaan ekaristi. Secara umum, Konstitusi Dogmatik mengenai Liturgi Suci (Sacrosanctum Concilium) artikel 14 mengungkapkan keinginan Konsili agar semua orang beriman dibimbing ke arah keikutsertaan yang sepenuhnya sadar dan aktif dalam perayaan-perayaan liturgi. Selanjutnya, SC 48 menegaskan bahwa kaum beriman, para peserta perayaan, hadir bukan sebagai orang luar atau penonton yang bisu. Mereka diharapkan agar melalui upacara dan doa-doa memahami misteri dengan baik dan ikut serta penuh khidmat dan secara aktif. Hal itu dikonkretkan, misalnya melalui aklamasi, jawaban-jawaban, pendasaran mazmur, lagu-lagu, dan lain-lain (*bdk.* SC 30).

Dari ajakan berpartisipasi dalam bidang liturgi, Vatikan II selanjutnya memperluas pada bidang moral kegerejaan dan bidang sosial kemasyarakatan pada umumnya. Hal ini terungkap oleh Konsili dalam Konstitusi mengenai Gereja (Lumen Gentium), artikel 38: Seluruh kaum awam dipanggil untuk menyumbangkan segenap tenaga, yang mereka terima berkat kebaikan Sang Pencipta dan rahmat Sang Penebus demi perkembangan Gereja serta pengudusannya terus- menerus. "Adapun kerasulan kaum awam itu (merupakan) keikutsertaan dalam perutusan keselamatan Gereja. Dengan baptis dan penguatan semua ditugaskan oleh Tuhan sendiri untuk kerasulan itu" (*bdk.* AA 2).[10] Gereja juga menjadi tanda kesatuan dan sarana keselamatan di dalam dunia. Untuk mencapai kesatuan itu, setiap orang dan setiap kelompok perlu mengembangkan keutamaan-keutamaan moral dan sosial dalam diri mereka sendiri dan menyebarkannya dalam masyarakat (*bdk.* LG 1 dan GS 30).

Dalam kaitan dengan partisipasi pelbagai pihak dan pelbagai bidang, kaum awam juga diminta untuk ikut ambil bagian dalam tanggung jawab pembinaan panggilan. "Tugas seluruh jemaat kristianilah untuk membina panggilan, agar kebutuhan-kebutuhan akan pelayanan rohani di seluruh Gereja terpenuhi dengan cukup; kewajiban ini terutama mengikat keluarga-keluarga kristiani, para pendidik dengan alasan khusus para imam, terutama para pastor paroki" (Kitab Hukum Kanonik, 233).

Secara lebih jelas dan konkret, sidang Agung KWI-Umat 1995 memberikan keterangan bahwa Gereja Indonesia dipanggil untuk hidup memasyarakat melalui wawasan kebangsaan yang memperjuangkan kepentingan umum. Tekanan khusus yang diharapkan menjadi perhatian umat antara lain: bidang kehidupan keluarga, pendidikan kaum muda, bidang sosial politik, dan bidang pembelaan kehidupan. Bidang pembangunan jemaat yang memasyarakat mendapat perhatian utama di banyak keuskupan di Indonesia. Dengan demikian, usaha untuk menggalakkan dialog dengan agama-agama lain, dengan kebudayaan, dan dengan orang-orang miskin semakin mendapat dukungan juga dalam pendidikan calon imam.

Dari Pola Pastoral Lama ke Pola Baru

Seperti terungkap dalam pengantar, sinyalemen mengenai situasi jemaat dan pola kerja pastoral lama mudah ditemui di banyak paroki di Indonesia. Secara singkat, dapat dicermati bahwa situasi dan pola pastoral yang lama itu memiliki ciri-ciri: hierarki sentris; petugas tertahbis menjadi penentu sekaligus pelaksana hampir seluruh bidang karya pastoral; otoriter, dengan menganut pola sikap hubungan atasan-bawahan; improvisatoris, tergantung selera sesaat pihak petugas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hasilnya belum tentu menjawab kebutuhan umat. Baik dari pihak petugas tertahbis maupun dari pihak umat, seakan-akan ada sikap saling mendukung "demi terselenggaranya feodalisme", entah gaya tradisional maupun gaya baru, yang biasa disebut neo-feodalisme. *Di satu pihak, pastor* senang diperlakukan secara khusus, mirip raja kecil yang sangat diperhatikan umat dan dipenuhi segala keperluannya; *di lain pihak, umat* juga tidak rela kalau pastornya diperlakukan secara demokratis, dianggap mitra kerja yang sederajat, apalagi "pelayan" dalam pengertian kultur Timur.[12] Selain itu, perlu pula dipertimbangkan pengertian dan model Gereja seperti dijelaskan oleh Romo Mangunwijaya, Pr. Pola Gereja diaspora seperti digambarkannya memerlukan pola pelayanan yang menjawab situasi kelompok-

kelompok kecil yang tersebar-sebar dengan menggunakan fasilitas yang cocok dengan hasil iptek modern.[13]

Adapun yang biasanya dimengerti sebagai pola baru adalah pola pastoral transformatif dan partisipatif. Cara kerja ini menerapkan pola kemitraan, keterlibatan semua pihak, kerja sama setara, bicara bersama, berunding, merencanakan, dan membuat program bersama. Selanjutnya, mereka memutuskan bersama, dan akhirnya melaksanakan bersama juga. Akibatnya, kerja pastoral ini bisa berhasil guna dan tepat sasaran bagi umat yang dilayani.

Pola kerja transformatif dapat dikembangkan jika ada kerja sama terpadu dalam kalangan lembaga-lebaga pembinaan pastoral, terutama dalam lembaga pendidikan calon imam, katekis, pusat-pusat pastoral dengan sekretariat-sekretariat paroki dan keuskupan (seksi-seksi dan komisi-komisi) yang memang secara strategis memiliki akses untuk kegiatan transformatif. Diperlukan pula pusat penelitian dan pengembangan agar kesinambungan transformatif berjalan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh semua pihak, menjadi ungkapan dan perwujudan iman yang otentik. Ada pendekatan lintas ilmu yang lebih mantap mempertanggungjawabkan kebijakan dan keputusan itu dari pelbagai seginya. Ada keterlibatan dari semua kelompok kategori dan semua unsur dalam masyarakat serta jemaat yang menginginkan adanya perubahan dalam komunitas yang bersangkutan.

Agar suatu kelompok dalam paguyuban dapat beralih dari suatu pola hidup lama ke suatu pola hidup baru, diperlukan adanya transformasi yang didukung oleh keterlibatan dan peran aktif seluruh kelompok dan unsur-unsur yang ada dalam Gereja. Karena itu, transformasi dapat dimengerti sebagai "etanoia"dan menuntut adanya usaha serius dalam mewujudkan pertobatan. Pertobatan itu diungkapkan dalam hubungan baru, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Hubungan dengan Allah direfleksikan kembali dalam aneka macam usaha teologis, yang hendaknya bersifat kontekstual dan pastoral dengan mengembangkan kristologi dari bawah sebagai pusatnya dan mencakup juga teologi inkulturasi dan teologi dialog lintas ilmu. Hal ini tentu banyak menyangkut pembaruan dalam bidang pendidikan dan pengajaran di seminari dan STFT. Sementara itu, pembaruan hubungan dengan sesama diwujudnyatakan antara lain melalui usaha memprioritaskan pembangunan jemaat basis, memperhatikan kelompok-kelompok kategorial, memupuk usaha-usaha dialog, rembug bersama baik di antara anggota jemaat maupun dengan masyarakat sekitar, dalam dialog dengan aneka ragam budaya, status sosial, agama, aliran politik, dan lain-lain.

Bertolak dari jemaat basis yang diprioritaskan dalam arah pastoral, maka hidup menggereja mengalami perubahan yang mendasar. Demikian pula tekanan pada Gereja yang memasyarakat mengakibatkan hidup Gereja tidak lagi hanya berpusat pada altar saja tetapi dari sekitar altar (sabda dan perjamuan) mengalir ke luar, dan dari luar kembali lagi ke perayaan ekaristi. Dengan demikian, ekaristi dapat menjadi sumber, puncak, dan pusat kehidupan Kristen. Karena itu, teologi menjadi refleksi iman yang memperhatikan ungkapan iman dalam ajaran dan liturgi sekaligus perwujudannya di dalam masyarakat. Lebih jauh, diperlukan refleksi teologi dengan mengkonsultasi ilmu-ilmu lain, memakai dan memanfaatkan ilmu-ilmu sosial, psikologi, dan kemajuan iptek pada umumnya sebagai mitra dalam refleksi itu. Menjadi jelaslah bahwa pendidikan dan pengajaran di seminari dan STFT mutlak perlu memperhatikan perkembangan dan kemajuan ilmu-ilmu supaya dapat mengerti hidup jemaat di tengah-tengah perubahan yang terjadi di sekitarnya. Sebab, di masa transformasi, umat mau mengikuti perubahan zamannya dan menyesuaikannya secara kritis.

Jemaat basis tidak lagi dikiblatkan secara otomatis pada hierarki. Perubahan ini kiranya lebih menuntut perubahan mental daripada menyangkut refleksi. Sebab, kesulitan dari refleksi sudah diatasi oleh pernyataan Konsili Vatikan II yang sejak awalnya sudah menegaskan bahwa Gereja adalah umat Allah (*bdk.* Konstitusi *Lumen Gentium,* Bab II), dengan segala rinciannya. Namun, mental hierarki-sentris yang didukung oleh petugas pastoral maupun oleh kaum awam masih menunjukkan betapa sulitlah transformasi mental itu. Bila hal ini tidak digarap dalam pendidikan calon imam, dengan menanamkan mental kemitraan dan kesejajaran pantingnya peranan awam *di satu pihak,* dan dihargainya perayaan Sabda sebagai unsur konstitutif perayaan ekaristi yang tidak kalah nilainya *di lain pihak,* maka mental hierarki sentris masih akan bertahan.

Ditinjau dari segi eklesiologis, pengertian umat basis kiranya lekat erat dengan paham komunio (paguyuban), yang menekankan bahwa semua unsur dalam jemaat bersama-sama berperan serta (partisipatif).[14] Dalam komunio ini, Gereja mengambil bagian dalam Hidup Ilahi melalui sabda dan sakramen. Melalui Roh Kudus, kita diberi bagian dan boleh mengambil bagian dalam hidup baru (ilahi); dalam ekaristi, kita diinkorporasi dalam Tubuh Tuhan (komuni).[15] Namun, banyak unsur lain, seperti segi kultural dan unsur status sosial (baik ekonomi maupun pen-

didikan), ikut membentuk mental hierarki-sentris yang ujung-ujungnya bermuara pada mental feodalisme dalam Gereja.

Bertolak dari panggilan manusia untuk bersatu dengan Allah, maka persekutuan dengan sesama menjadi ungkapannya yang konkret. Menurut LG 9, Israel Baru yang adalah Gereja Kristus merupakan himpunan yang telah dikumpulkan oleh Kristus melalui darah-Nya. Kristus melengkapi dan memenuhi jemaat itu dengan sarana-sarana yang tepat untuk mewujudkan persatuan yang tampak dan bersifat sosial. Allah memanggil mereka untuk berhimpun menjadi Gereja supaya menjadi sakramen kelihatan yang menandakan kesatuan yang menyelamatkan di dalam dunia ini.

Beberapa Pemikiran dan Persoalan mengenai Pendidikan Calon Imam untuk Gereja Partisipatif dan Transformatif di Masa Mendatang

Kembali pada soal awal: dalam pendidikan di STFT, kita mau menyiapkan petugas pastoral macam apa? Apakah sebagai petugas lapangan, yang bertindak sebagai penentu dan penguasa dalam semua bidang karya pastoral? Sebagai pendamping dan pelancar yang ahli dalam bidang pastoral? Sebagai pelayan sakramental, penggembala, dan pengajar umat? Di mana pola mental transformatif-partisipatif harus masuk, berpengaruh, dan menjadi warna dasar untuk kepemimpinan pastoral? Apakah pembinaan pastoral di STFT mengandaikan bahwa petugas pastoral tertahbis adalah fokus dan pusat karya pastoral (paroki, kategorial) ataukah sekian banyak kelompok jemaat basis adalah pusat-pusat kegiatan dan rencana pastoral? Lebih menyiapkan petugas pastoral profesional untuk membuat sesuatu bagi orang lain, atau untuk mendampingi proses yang melibatkan sebanyak mungkin orang?[16]

Kalau disinyalir adanya gejala krisis kepemimpinan, karena bersifat otoriter, feodal (menurut model atasan-bawahan), tidak menjawab kebutuhan umat, maka di tempat pendidikan calon imam, para mahasiswa harus dilatih dalam mental kepemimpinan yang menciptakan suasana kolegial dan dibina dalam lingkungan hidup, kemitraan, persaudaraan antara dosen dan mahasiswa, antarmahasiswa, frater dan mahasiswa awam, antara pembina dan yang dibina. Kalau di STFT calon imam sudah dilatih untuk pastoral transformatif, apakah imam baru dapat mempraktekkannya di lapangan, ataukah ia akan kembali ke pola pastoral lama, terpengaruh oleh pastor senior?

Pembaruan berlangsung di banyak wilayah: dalam *umat basis*, jemaat paroki, stasi, komisi keuskupan (lembaga pastoral, dewan pastoral) perlu dikembangkan hidup menggereja yang transformatif dan partisipatif, demikian pula dalam *lembaga-lembaga pendidikan pastoral*, seminari, sekolah kateketik, pusat pastoral, dan lain-lain. Perlu kerja sama yang kreatif supaya terjadi pembaruan bersama. Penanaman spiritualitas transformatif dan partisipatif kiranya mutlak diintensifkan pada jemaat dan pada para pemimpinnya, dan hasil integratif dari keduanyalah yang menentukan keberhasilan pembaruan di dalam Gereja. Dekrit mengenai pendidikan imam (Optatam Totius), artikel 20 menyarankan: "Hendaklah para seminaris disiapkan dengan cermat untuk membangkitkan dan menggairahkan kerasulan awam, begitu pula untuk mengembangkan aneka bentuk kerasulan yang lebih efektif".

Penjabaran dari saran dan refleksi di atas bisa menyangkut dua bidang, yaitu: bidang pengajaran (kurikulum) dan kegiatan (ekstrakurikuler). Untuk bidang pengajaran, pihak STFT perlu memperhitungkan pelbagai tuntutan, mulai dari tersedianya SKS dan banyaknya matakuliah dan topik-topik yang harus masuk sampai pada perlunya diintegrasikan pelbagai matakuliah dari ilmu-ilmu sosial yang relevan ke dalam refleksi teologis. Sementara itu, dalam kegiatan ekstrakurikuler, umumnya pihak STFT akan lebih banyak bekerja sama dengan konvik dan rumah-rumah pendidikan, sebab melalui koordinasi dengan konvik itulah kegiatan lebih banyak bisa dijalankan.

Akhir Kata

Gereja partisipatif dan transformatif pada milennium ketiga memiliki dimensi-dimensi baru yang kiranya akan lebih responsif terhadap kebutuhan jemaat yang makin terbuka dan makin memasyarakat. Keikutsertaan semua unsur dalam Gereja yang berpusat pada jemaat basis mengajak kita untuk mengadakan pembaruan dan perubahan dalam Gereja itu sendiri, terlebih juga dalam lembaga-lembaga pendidikan para petugas pastoral. Tidak terkecuali di seminari-seminari dan di semua STFT, pendidikan dan pembinaan yang bersifat partisipatif dan transformatif patut selalu diusahakan, karena para petugas pastoral inilah yang nantinya memegang peranan strategis dalam perubahan di dalam Gereja.

CATATAN

1 *Bdk.* Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, *Pedoman-pedoman tentang persiapan para pembina di Seminari*, 4 November 1993, khususnya art. 6–9. Terjemahan oleh R. Hardawiryana, Dokpen KWI, *Seri Dokumentasi Gerejawi* no. 47 (Jakarta: Obor, 1996).

2 Pada semester I tahun ajaran 1999/2000, kami mengunjungi 10 tempat pendidikan calon imam (STFT) di Indonesia. Penelitian yang diadakan bertema: "Pendidikan Calon Imam dan Dialog: dengan agama lain, dengan kebudayaan, dan dengan kaum miskin". Hasil lengkap penelitian tersebut akan disampaikan pada Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma dan akan diterbitkan dalam majalah SAWI (terbitan KKM-KWI dalam kerja sama dengan KKI, Oktober 2000).

3 Dipakai sebagai pedoman umum untuk kurikulum STFT;
- Konsili Vatikan II, Dekrit *Optatam Totius* tentang pembinaan imam, 28 Oktober 1965, (khususnya bab V: Peninjauan kembali studi gerejawi, no.15. Peninjauan kembali studi filsafat; 16. Peningkatan studi teologi).
- Kongregasi untuk Pendidikan Katolik,
- *Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis*, 19 Maret 1985.
- *The Theological Formation of Future Priests*, 22 Februari 1976.
- *The Study of Philosophy in Seminaries*, 20 Januari 1972.
- *Instruction on Liturgical Formation in Seminaries*, 1979.
- *On the Teaching of Canon Law to Those Preparing to be Priests*, 2 April 1975.
- Yoannes Paulus II, *Apostolic Constitution Sapientia Christiana, on Ecclesiastical Universities, and norms of application of the Congregation for Catholic Education for the correct implementation of the above*, 15 April 1979.

4 Dalam beberapa sidang MAWI/KWI dibicarakan pendidikan calon imam. Pada tahun 1966, MAWI memberi tugas kepada PWI Seminari untuk menyusun rencana pendidikan untuk Seminari Menengah dan Seminari Tinggi (dalam hal ini soal integrasi antara filsafat dan teologi). Pada tahun 1970, ditetapkan kriteria dan sifat-sifat calon imam yang dianggap layak untuk dididik di Seminari; pada 1977, disusun sintesis dari hasil diskusi tentang pendidikan pastoral calon imam; pada tahun 1986, dibicarakan kemungkinan menyusun "Ratio Fundamentalis Nationalis"; pada tahun 1988, disusun "Pedoman Dasar Pembinaan Imam di Indonesia" yang diberlakukan *ad experimentum*. Pada tahun-tahun selanjutnya, KWI membicarakan soal Kurikulum Nasional (1994) dan *On going Formation* untuk imam-imam muda. *Bdk.* J. Hadiwikarta, *Himpunan Keputusan MAWI 1924–1980* (Jakarta: Obor, 1981); R. Hardawiryana, *Himpunan Keputusan Sidang dan Presidium MAWI/KWI 1981–1991* (Jakarta: Obor, 1992).

5 *Bdk.* Ferd. Heselaars Hartono, *Paroki 2000*. Bahan Studi Pembangunan Jemaat, Seri Pembangunan Jemaat (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm.13.

6 Dikutip dari E. Gerrit Singgih, *Reformasi dan Transformasi Pelayanan Gereja, menyongsong abad ke-21* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 15.

7 *Bdk.* Sessi 23, kanon 18: De Seminariis.

8 Pokok-pokok tersebut sudah disebut dalam Himbauan Apostolik oleh Paus Pius XII, "Menti nostrae", 1950.

9 Disarikan dari beberapa sumber lain: J.A. O'Donohoe, "Seminary" hlm. 72–75; J.J. Markham, "Seminaries and Universities" hlm. 72; O. Magrath, "Seminaries Missionary" hlm. 71–72, dlm: *New catholic encyclopedia*, Vol.XIII, Washington, 1967, hlm. 71–75. *Bdk.* Kenan B.Osborne, *Priesthood: A history of the ordained ministry in the Roman Catholic Church* (New York: Paulist Press, 1987).

10 Bdk. Paus Yoannes Paulus II, *Imbauan apostolik pasca sinode: Christifideles laici*, Seri Dokumen Gerejawi no. 5, terj. Dokpen KWI (Jakarta: Obor, 1989), khususnya Bab II: "Semua ranting Pokok Anggur Tunggal. Partisipasi kaum awam beriman di dalam kehidupan Gereja sebagai persekutuan", dan Bab III: "Aku telah menugaskan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah. Ikut bertanggung jawab kaum awam beriman dalam perutusan Gereja". Dalam bagian-bagian ini, diuraikan secara lebih lengkap dan rinci pokok-pokok yang intinya ada pada AA2 di atas.

11 *Bdk. Hasil-hasil Sidang Agung KWI-Umat 28 Oktober – 2 Nopember 1995* (Malang: Dioma, 1996), hlm. 7–23.

12 *Bdk.* John Mansford Prior, "Pastoral Transformatif", dlm. John Djegadut (ed.), *Evangelisasi Baru dalam Jemaat Basis* (Ende: Nusa Indah, 1996), hlm. 20–36.

13 Y.B. Mangunwijaya, *Gereja Diaspora* (Yogyakarta: Kanisius, 1999). *Bdk.* Guido Tisera, "Inspirasi Firman", dlm. Romanus Satu – Herman Embuiru, *Gereja Milenium Baru*, Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret, Yayasan Gapura, khususnya hlm. 158st.

14 *Bdk.* G.Kirchberger (ed.), *Gereja dalam Perubahan*, Seri Pastoralia (Ende: Nusa Indah, 1992), hlm. 63–68.

15 Dalam Gereja-Gereja tradisional di Eropa, ditekankan bahwa imam tertahbis mendapat kekuasaan khusus karena tahbisannya, lebih-lebih sebagai pelayan sakramen-sakramen, seperti tercermin dalam tulisan Csaba Ternyak, uskup tituler di Sekretariat Kongregasi untuk Klerus, *Il ministero sacerdotale verso il terzo millennio* (Napoli: Grafitalia, 2000), hlm. 15st. Sekitar peranan imam dalam dunia modern sekarang ini, muncul pelbagai pendapat dan diskusi, bdk. misalnya, Eugene C. Bianchi and Rosemary Radford Ruether (eds.), *A democratic catholic Church. The reconstruction of Roman catholicism* (New York: Crossroad, 1993); Karl Rahner, "How the Priest should View His Official Ministry", dlm. *Theological Investigations*, vol. XIV, London, 1971, hlm. 202–219; "Gambaran Modern Seorang Imam: Dasar-Dasar Dogmatis Pengertian Diri Imam", *Orientasi* 2, 1970, 21–40; Tom Jacobs, "Kedudukan Imam di Dalam Gereja", *Spektrum* 1971, Lampiran 1, no. 4, 5–41; Kevin Gilles, *Patterns of ministries among the first christians* (Australia: Collins Dove, 1989); Gisbert Greshake, *The meaning of christian priesthood* (Christian Classics, 1989); Cl. Groenen, "Peranan Mereka yang Ditahbis pada Gereja Yesus Kristus", *Orientasi Baru*, 1987, 13–40; L.Grollenberg a.o., *Minister? Pastor? Prophet?, Grass-roots leadership in the Churches* (London: SCM Press), 1987.

16 *Bdk.* John Mansford Prior, "Membangun Hidup Jemaat yang Memasyarakat", dlm. John Djegadut, *Evangelisasi Baru dalam Jemaat Basis*, hlm. 103–116; Pastoral Transformatif, *ibid.*, hlm. 20–35.

DAFTAR PUSTAKA

———,
1995 *Kamu adalah saksiKu.* Sebuah pedoman imam.

Banawiratma, J.B.,
1987 Visi imamat sebagai dasar pendidikan seminari, dlm. *Orientasi Baru* 1:1–12.

Bianci, Eugene C. – Rosemary Radford Ruether (eds.),
1993 *A democratic catholic Church. The reconstruction of Roman catholicism.* New York: Crossroad.

Csaba Ternyak,
2000 *Il sacerdozio ministeriale verso il terzo millennio.* Napoli: Grafitalica.

Djegadut, John (ed.),
1996 *Evangelisasi baru dalam jemaat basis,* dlm. Seri Pastoralia. Ende: Nusa Indah.

Gilles, Kevin,
1989 *Patterns of ministries among the first christians.* Australia: Collins Dove.

Greshake, Gisbert,
1989 *The meaning of christian priesthood.* Westminster: Christian Classics.

Groenen, Cl.,
1987 "Peranan Mereka yang ditahbis pada Gereja Yesus Kristus", dlm. *Orientasi Baru* 1:13–40.

Grollenberg, L. (dkk.),
1987 *Minister? Pastor? Prophet? Grassroots leadership in the Churches.* London: SCM Press.

Hadisumarta, F.X.,
1979 *Beberapa catatan tentang: Situasi Gereja di Indonesia,* Seri Pastoral 18, Yogyakarta: Pusat Pastoral.

Hadiwikarta, J.,
1981 *Himpunan Keputusan MAWI 1924–1980.* Jakarta: Obor.

Hardawiryana, R.,
1979 Pendidikan Pastoril Calon Imam di Indonesia, dlm. *Spektrum* 9:1–73.

1992 *Himpunan keputusan sidang dan presidium MAWI/KWI 1981–1991*. Jakarta: Obor.

1996 *Hasil Sidang Agung KWI-Umat: 28 Oktober – 2 Nopember 1995*. Malang: Dioma.

Heselaars Hartono, Ferd.,

2000 *Paroki 2000. Bahan Studi Pembangunan Jemaat*, Seri Pembangunan Jemaat. Yogyakarta: Kanisius.

———,

1973 *Imamat sebagai Pelayanan Umat*, (document) Sinode Uskup Sedunia, terj. Marcel Beding. Ende: Nusa Indah.

———,

1996 *Iman Katolik: Buku Informasi dan Referensi*, Konferensi Waligereja Indonesia. Yogyakarta: Kanisius & Obor.

Jacobs, T.,

1970 Konstitusi dogmatis Lumen Gentium, mengenai Gereja, terjemahan, introduksi, komentar, *Seri Orientasi* (3 jilid).Yogyakarta: Kanisius.

1971 Kedudukan imam di dalam Gereja, *Spektrum* lampiran 1, no. 4:5–41.

Joannes Paulus II,

1979 *Surat kepada Semua Imam Gereja pada Kesempatan Kamis Suci 1979*. Jakarta: Dokpen MAWI.

———,

1995 *Katekismus Gereja Katolik*, terj. Herman Embuiru, SVD. Ende: Propinsi Gerejani Ende, khususnya hlm. 414–430.

Kirchberger, G. (ed.),

1992 *Gereja dalam perubahan*, Seri Pastoralia. Ende: Nusa Indah.

Magnis-Suseno, F.,

1992 *Imamat di Gereja Indonesia*, Seri Pastoral 202. Yogyakarta: Pusat Pastoral.

Mangunwijaya, Y.B.,

1999 *Gereja diaspora*.Yogyakarta: Kanisius.

———,

1994 *Norms for priestly formation*, vol. I–II: November 1993. Washington, D.C.: National Conference of Catholic Bishops.

Osborne, Kenan B.
1988 *Priesthood. A history of the ordained ministry in the roman catholic Church.* New York: Paulist Press.

———,
1971 *Pembinaan para imam dalam hidup dan karya di wilayah Gereja Indonesia.* Jakarta: Obor.

———,
1987 *Pendidikan imam dalam masyarakat Indonesia modern,* kumpulan naskah seminar antara rohaniwan, biarawan, dan awam. Jakarta: Yayasan Gembala Utama.

———,
1977 *Pendidikan pastoril calon imam di Indonesia.* Jakarta: Dokpen MAWI.

Rahner, Karl
1970 Gambaran modern seorang imam: Dasar-dasar dogmatis pengertian diri imam, *Orientasi* 2:21–40.
1976 How the priest should view his official ministry, dlm. *Theological Investigations,* vol. XIV. London, hlm. 202–219.

Satu, Romanus – Herman Embuiru (ed.)
2000 *Gereja millennium baru. Sebuah bunga rampai.* Seminari Tinggi St. Petrus Ritapiret: Yayasan Gapura.

———,
1992 "Some aspects of the Church understood as communion", *Origins* 22:108–112.